



# **PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

##### **(a) Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### **(b) Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

##### **(c) Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui



# **PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pengelolaan anggaran yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan. Laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya juga menyediakan informasi tentang peningkatan pembangunan sarana prasarana Publik.

#### **1.1.2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Komponen laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Laporan Operasional
- d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya periode pelaporan tahun 2018 berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam :



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

1. Undang – undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753 );
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara);  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 05, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya ( Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 ) ;
  10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 ( Lembaran Daerah Kota Palangka Tahun 2018 Nomor 8 );
  12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 4 );
  13. Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 24 );
  14. Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 31 );
  15. Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 22 Tahun 2018 tentang Peruban Kelima Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Kota Palangka Raya ( Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 23 ).

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

**BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian target Kinerja APBD SKPD

**BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 3.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan keuangan  
Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

**BAB IV. PENJELASAN POS –POS LAPORAN KEUANGAN**

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 4.1.1. Pendapatan
  - 4.1.2. Belanja
- 4.2. Beban
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 4.3.1 Aset
  - 4.3.2 Kewajiban
  - 4.3.3 Ekuitas
- 4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

**BAB V. PENUTUP**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**  
**SKPD**

**II.1. EKONOMI MAKRO**

APBD merupakan gambaran dalam bentuk *record* tertulis tentang pelaksanaan pembangunan suatu daerah. APBD disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pertanggungjawaban APBD diperlukan sebagai bentuk evaluasi untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan selama satu tahun anggaran.

APBD Kota Palangka Raya tahun 2021 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, di mana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Penyusunan APBD Tahun 2018 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

**1. Partisipasi Masyarakat**

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

**2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis / objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

**3. Disiplin Anggaran**

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

**4. Keadilan Anggaran**

Pajak, Retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan hal tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan.

**5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai pelaksanaan Program/kegiatan APBD.

Berikut ini adalah kondisi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2021 :

**1. Geografis**

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada : 6°40' – 7°20' Bujur Timur dan 1°30' – 2°30' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Desa/Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas Sebelah Timur: Kabupaten Gunung Mas Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Barat: Kabupaten Katingan Kota Palangka Raya mempunyai Luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) ibagi kedalam 5 Kecamatan yaitu Kecamtan Pahandut,

Sebangau, Jekan Raya, Bukit batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km<sup>2</sup>, 583,50 Km<sup>2</sup>, 352,62 Km<sup>2</sup>, 572,00 Km<sup>2</sup> dan 1.053,14 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km<sup>2</sup> dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kawasan Hutan : 2.485,75 Km<sup>2</sup>
2. Tanah Pertanian : 12,65 Km<sup>2</sup>
3. Perkampungan : 45,54 Km<sup>2</sup>
4. Areal Perkebunan : 22.30 Km<sup>2</sup>
5. Sungai & Danau : 42.86 Km<sup>2</sup>
6. Lain-lain : 69,41 Km<sup>2</sup>

## **II. 2. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita. Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekuen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan – tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan Pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).  
Sejalan dengan strategi belanja daerah tersebut, maka prioritas belanja daerah tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Prioritas pembangunan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
- 2) Mengupayakan seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja.
- 3) Menghindari pemborosan anggaran belanja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sangat diperlukan. Dalam kaitan, maksud



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

di atas prioritas pembangunan daerah tahun 2021 diletakkan pada upaya-upaya pokok sebagai berikut:

- a. Penggalian dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah adalah meningkatkan ekonomi rakyat dan penguatan otonomi daerah dengan program prioritas sebagai berikut :
  - 1) Program pengembangan kelembagaan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana BPRD Kota Palangka Raya serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - 2) Program pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
  - 3) Program intensifikasi pendapatan asli daerah
  - 4) Program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan.
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan berdasarkan prinsip-prinsip
  - 1) Hemat, tidak mewah sesuai dengan ketentuan teknis yang diisyaratkan
  - 2) Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing badan, dinas, lembaga, satuan perangkat kerja daerah.
  - 3) Keharusan untuk sedapat mungkin menggunakan kemampuan dan hasil produksi dalam negeri.
  - 4) Mengutamakan rekanan pengusaha golongan ekonomi lemah.
- c. Prioritas anggaran untuk program dan kegiatan dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik
- d. Dengan semangat dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

**II. 3      PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

**II. 3. a.    Pendapatan LRA**

Realisasi pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah Rp. 0,-

**II. 3. b.    Belanja**

**Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 12.469.005.726,00 -, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Tahun 2021	Tahun 2020	2021 - 2020	%
1	Belanja Pegawai	4.113.034.518,00	3.969.501.312,00	143.533.206	3,61
2	Belanja Barang dan Jasa	8.355.971.208,00	4.496.550.669,00	3.859.420.539	85,83
Jumlah		12.469.005.726,00	8.466.051.981,00	4.002.953,745	47,28

Rincian Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 12.469.005.726,00 -, tertuang pada lampiran LRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021.

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa

- Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 4.113.034.518,00 dimana dalam belanja pegawai tersebut terdiri dari belanja gaji dan tunjangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.520.731.097,00, belanja tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.430.663,421,00 dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar Rp. 161.640.000

- Belanja Barang dan Jasa



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

Realisasi belanja barang dan jasa dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 8.355.971.208,00 dimana dalam belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang dengan realisasi anggaran sebesar 597.599.150,00 dan belanja jasa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.494.208.164,00. Berikut Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa :

No	Uraian	Pagu Anggaran 2021	Realisasi 2021	Bertambah/Berkurang	
				Realisasi - Pagu	%
1	Belanja Pegawai	4.317.189.814,00	4.113.034.518,00	(204.155.296,00)	95,27
2	Belanja Barang dan Jasa	8.573.637.604,00	8.355.971.208,00	(217.666.396,00)	97,46
Jumlah		12.890.827.418,00	12.469.005.726,00	(421.821.692,00)	96,73

**Belanja Modal**

Belanja Modal adalah salah satu kunci utama agar suatu Badan atau Institusi bisa memperoleh aset tetap dengan cara membeli. Selain itu, belanja modal adalah hal yang penting harus dilakukan oleh pemerintah daerah, manfaatnya akan bisa dirasakan hingga satu tahun anggaran lebih setelah dilakukannya pengeluaran. Belanja modal juga bisa dilakukan dengan cara menambah aset ataupun kekayaan milik pemerintah daerah agar bisa menambah belanja yang memiliki sifat rutin. Belanja modal untuk tahun anggaran 2021 pada dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya hanya meliputi belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :

- Belanja Modal alat Kantor dan Rumah Tangga, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.211.396,00
- Belanja Modal alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.908.000,00



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

- Belanja Modal Komputer, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.517.563.500,00

Berikut Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran untuk Belanja Modal :

No	Uraian	Pagu Anggaran 2021	Realisasi 2021	Bertambah/Berkurang	
				Realisasi - Pagu	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.820.884.396,00	1.745.682.896,00	(75.201.500,00)	95,87
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	0,00	0,00	0,00	
Jumlah		1.820.884.396,00	1.745.682.896,00	(75.201.500,00)	95,87

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.745.682.896,00-, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Tahun 2021	Tahun 2020	2021 - 2020	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.745.682.896,00	1.612.804.100,00	132.878.796	8,24
2	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	28.111.000,00	28.111.000	(100,00)



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

Rincian Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp. 1.745.682.896,00-, tertuang pada lampiran LRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021.

Strategi anggaran belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan sumber daya yang tersedia serta kondisi perekonomian.

Secara umum kebijakan pemerintah telah menetapkan sebagai berikut :

- a. Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan
- b. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor
- c. Revitalisasi pertanian dan pedesaan
- d. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- e. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi
- f. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta mencegah munculnya konflik vertikal maupun horizontal
- g. Merehabilitasi dan mengkontruksi daerah yang terkena bencana alam.

#### **II. 4 INFORMASI TENTANG ORGANISASI**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya pada Tahun 2019 kembali berubah nomenklaturnya dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya tanggal 15 November 2019, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya tanggal 23 Desember 2019 .

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah :

- 1 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

2 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang aplikasi informatika, pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang aplikasi informatika, pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi informatika, pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang aplikasi informatika, pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditetapkan dengan Tipe A, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- b. Kepala Dinas;
- c. Sekretariat, yang membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
  1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  2. Seksi Pengembangan Aplikasi, Penyelenggaraan Domain dan Website; dan



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

3. Seksi Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik..
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahkan:
  1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
  2. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
  3. Seksi Kemitraan Informasi Publik.
- f. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahkan :
  1. Seksi Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
  2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
  3. Seksi Layanan Hubungan Media dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
- g. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan :
  1. Seksi Statistik Sektoral dan Data Parsial;
  2. Seksi Tata Kelola Persandian; dan
  3. Seksi Operasional Keamanan Persandian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Kelompok Jabatan Pelaksana.





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

**BAB III**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**III.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN**

Entitas Laporan Keuangan adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

**111.2 KEBIJAKAN PELAPORAN**

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Palangka Raya mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Mudah dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya kepada para pemakai/ stakeholders.

**A. Asumsi Dasar/Basis Akuntansi**

Neraca Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 th 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut ini disajikan delapan prinsip



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu :

**1. Basis akuntansi (accounting basis);**

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan Operasional. Dalam hal ini peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.
- b. Basis Akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
- c. Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).
- d. Basis Akrual Untuk Neraca bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

**2. Prinsip nilai perolehan (historical cost principle);**

1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

**3. Prinsip realisasi (realization principle);**

1. Ketersediaan Pendapatan (basis Kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) tidak mendapat penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sector swasta.

**4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (substance over form principle);**

1. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

**5. Prinsip periodisitas (periodicity principle);**

1. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan dan semesteran sangat dianjurkan.

**6. Prinsip konsistensi (consistency principle);**

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**7. Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure principle);**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

**8. Prinsip penyajian wajar (fair presentation principle).**

1. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan



# **PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat dalam mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

#### **B. Definisi Unsur Laporan Keuangan**

##### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang. Unsur-unsur dari Laporan Realisasi anggaran adalah:

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut sudah benar-benar diterima.

##### **2. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui saat transaksi dilakukan (accrual basic), baik kas sudah dikeluarkan ataupun belum.



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

#### 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan pembiayaan dan non anggaran.

#### **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

##### **1. Periode Akuntansi**

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021.

##### **2. Pos-Pos Neraca**

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas:

- a. Asset
- b. Kewajiban



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

c. Ekuitas Dana

**A. AKTIVA**

Tujuan kebijakan akuntansi aktiva adalah mengatur perlakuan akuntansi aktiva. Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik. Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan, dan aktiva lain-lain.

**i. Aktiva Lancar**

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aktiva lancar terdiri atas:

1.1. Kas di Kas Daerah

1.1.1. Kas adalah alai pembayaran Sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kota Palangka Raya yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

- 1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran, adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.
  - 1.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan stock opname.
  - 1.2.2. Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil stock opname.

**ii. Piutang**

- 2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- 2.2 Piutang terdiri atas: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.
- 2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- 2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
  - a. Klarifikasi piutang menurut umur
  - b. Klarifikasi piutang menurut debitor

**3) Persediaan Barang Pakai Habis / Material**

- 3.1 Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

- 3.2 Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja dan sebagainya.
- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis/ Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis/ Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis/ Material dinilai berdasarkan:
  - a. Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
  - b. Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/ klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

**4) Investasi Jangka Panjang**

- 4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
  - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (investee) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

**5) Aktiva Tetap**

- 5.1 Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai mana manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- 5.2 Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.
- 5.3 Aktiva tetap antara lain terdiri dari :



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
  - a. Alat-Alat Berat.
  - b. Alat Angkutan
  - c. Alat Bengkel dan Alat Ukur.
  - d. Alat Pertanian.
  - e. Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga.
  - f. Alat Studio dan Alat Komunikasi.
  - g. Alat-Alat Kedokteran.
  - h. Alat-Alat Laboratorium.
3. Gedung dan Bangunan
  - a. Bangunan Gedung
  - b. Bangunan Monumen
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
  - a. Jalan dan Jembatan.
  - b. Bangunan Air (irigasi).
  - c. Instalasi
  - d. Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
  - a. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
  - b. Hewan Ternak dan Tumbuhan.
  - c. Alat Keamanan.

#### 5.4 Penjelasan Akun Aktiva Tetap

##### a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

d. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

e. Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

f. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

g. Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

h. Alat-alat Berat

Alat-alat Berat meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

i. Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

j. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

k. Alat Pertanian



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpan dan lain-lain sejenisnya.

l. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan. Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

m. Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

n. Alat-alat Kedokteran

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

o. Alat-alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.

p. Buku dan Perpustakaan

Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.

q. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.

r. Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

s. Alat Keamanan

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

#### 5.4.1 Pengakuan

- a. Aktiva tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- b. Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aktiva tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aktiva karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aktiva tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan :

- (1) diperpanjang usia manfaat,
- (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aktiva tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

tetap. Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aktiva yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aktiva.

#### **ii. Pengukuran**

- a. Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- b. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- c. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- d. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- e. Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

- f. Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- g. Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- h. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- i. Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- j. Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- k. Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

- l. Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- m. Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- n. Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- o. Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- p. Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- q. Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- r. Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- s. Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- t. Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

**5.4.1.1 Penilaian**

Aktiva tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

**5.4.1.2 Pengungkapan**

- a. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- b. Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

**6) Dana cadangan**

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

**7) Aktiva Lain-Lain**

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan dana Cadangan. Aktiva lain-lain terdiri dari:

- 7.1 Tagihan penjualan angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.

**7.2 Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan penjelasannya**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan Cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

- 7.3 Bangunan dalam pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- 7.4** Lain-Lain aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

#### **A. KEWAJIBAN**

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Utang dikelompokkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

##### **1. Kewajiban jangka pendek**

- a. Utang Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Jangka Pendek terdiri atas :
  - 1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
  - 2) Kewajiban Biaya Pinjaman merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan commitment fee/ Commitment Charge. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. Commitment Fee adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

- 3) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
- b. Utang jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
  - c. Utang jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.
  - d. Utang jangka pendek yang disajikan dalam laporan ini merupakan pembayaran utang Pemerintah Kota Palangka Raya yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2016.

## 2. Kewajiban jangka panjang

Utang Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang terdiri dari:

- a. Utang jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, Berta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. Utang Bunga merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

(satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

- c. Utang Belanja merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah dibebankan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. Utang Pajak merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Kota Palangka Raya namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. Pendapatan Diterima di Muka merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan.
- f. Utang Lain -lain merupakan utang Lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

#### **B. EKUITAS DANA**

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

##### **a. Ekuitas Dana Lancar**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

- i. Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- ii. Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- iii. Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.
- iv. Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
2. Cadangan untuk piutang adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
3. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

Tahun Anggaran 2014. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.

5. Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah kekayaan Kota Palangka Raya yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
6. Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

**a. Ekuitas Dana Investasi**

- 1) Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- 2) Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.

**b. Ekuitas Dana Cadangan**

- 1) Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
- 2) Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.
- 3) Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan
- 4) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan. Ekuitas Dana Dicadangkan diantaranya :
  1. Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

2. Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

**Laporan Operasional**

Unsur yang dicakup Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsure dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau baban luar biasa, tidak diharapkan sering atau rutin dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

**Laporan Perubahan Ekuita**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah



# **PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**

### **STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan;
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- e. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Daftar dan skedul;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 terdapat kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, meliputi :

1. Mulai Tahun Anggaran 2015 laporan keuangan sudah menerapkan sistim Akuntansi berbasis akrual sehingga mempengaruhi dalam laporan keuangan karena ada tambahan laporan operasional dan laporan perubahan SAL, dimana pada sistim akuntansi yang berbasis KAS belum ada.
2. Sejak tanggal 30 Desember 2016 terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

dan Arsip menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

3. Sesuai dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/484/2017 Tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Palangka Raya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
4. Sesuai dengan keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/559/2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagai berikut

#### A. Aset Tetap

##### 1. Peralatan dan Mesin **Rp. 0,00**

##### 1.1 Alat Kantor dan Rumah Tangga

**Rp. 0,00**

a. Alat Kantor **Rp. 0,00**

b. Alat Kantor lainnya **Rp. 0,00**

c. Alat Rumah Tangga **Rp. 0,00**

d. Alat Rumah Tangga lainnya **Rp. 0,00**

##### 1.2 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

**Rp. 0,00**

##### 1.3 Alat Pendingin **Rp. 0,00**

##### 1.4 Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer **Rp. 0,00**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

1.5 Alat Studio dan Alat Komunikasi

**Rp. 0,00**

a. Peralatan Studio Visual **Rp. 0,00**

b. Peralatan Studio Video dan Film

**Rp. 0,00**

2. Gedung dan Bangunan **Rp. 0,00**

3. Aset Tetap Lainnya **Rp. 0,00**

**TOTAL ASET TETAP Rp. 0,00**

**B. Aset lainnya ( Aset Tidak Berwujud ) Rp. 0,00**

**TOTAL ASET LAINNYA Rp. 0,00**

5. Laporan hasil penelusuran barang yang tidak diketahui keberadaannya (TDK) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah tentang barang yang tidak diketahui keberadaannya (TDK) sebesar **Rp. 312.603.467,66,-** (*Tiga ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh koma Enam Puluh Enam* )

I. Hasil Penelusuran Pertama :

(1) Peralatan dan Mesin ( alat kantor dan rumah tangga lainnya) sebesar **Rp. 538.765.150,-** (*lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*) diketemukan dalam keadaan/kondisi rusak berat. (data terlampir)

(2) Peralatan dan Mesin ( alat kantor dan rumah tangga lainnya ) sebesar **Rp. 112.549.200,-** (*seratus dua belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) diketemukan dalam keadaan/kondisi baik. (data terlampir)



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

- (3) Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 281.800.000,-** (*dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) ditemukan dalam keadaan/kondisi baik. (data terlampir)
- (4) Terdapat barang yang dimasukkan dalam extracomtable karena nilai perolehan di bawah nilai kapitalisasi yaitu sebesar **Rp. 1.814.000,-** (*satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*). (data terlampir)

II. Hasil Penelusuran Kedua :

1. Pada Peralatan dan Mesin (peralatan jaringan) sebesar **Rp. 523.998.000,-** (*lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) yaitu pembuatan Sistem Aplikasi Informasi satu Atap (SIMTAP) Tahun 2007 ditemukan dalam keadaan/kondisi rusak berat, yang tercatat pada KIB sebesar **Rp. 523.998.000,-** (*lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). (data terlampir).
2. Dari hasil penelusuran dengan mantan penyimpan barang dan staf eks Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka Raya ditemukan double pencatatan pada KIB peralatan dan mesin (alat kantor dan rumah tangga lainnya) sebesar **Rp. 15.450.000,-** (*lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) yaitu 6 (enam) buah brankas. (data terlampir).

III. Jumlah barang yang ditemukan dan sisa barang TDK :

1. Total nilai barang TDK yang ditemukan dalam kondisi baik dan rusak berat sebesar **Rp. 1.474.376.350,-** (*satu milyar*



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

*empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).*

2. Sisa barang TDK yang tersaji sesuai dengan data pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, yang tetap akan ditelusuri sebesar **Rp. 312.603.467,66,-** *(tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam puluh enam).*

**IV. Hasil Penelusuran Ketiga :**

Barang yang sudah yang ditemukan dari sisa **312.603.467,66,-** *(tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam puluh enam rupiah)* sebesar **Rp. 265.826.266,66,-** *(dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam koma enam puluh enam rupiah).* Sisa yang masih ditelusuri sebesar **Rp. 46.777.201,-** *(empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).*

**V. Hasil Penelusuran Keempat :**

Sisa barang yang tidak diketahui keberadaannya dan masih ditelusuri sebesar **Rp. 46.777.201,-** *(empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).* untuk Tahun 2018 ini belum dapat ditemukan keberadaannya mengingat barang-barang tersebut cukup terlalu lama tahun pengadaannya diantaranya Tahun 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 dan 2011 (kurang lebih 18 Tahun) pengadaan barang tersebut berupa meubel : lemari buku, lemari makan, almari, meja kursi, sofa, meja komputer. Kami berusaha



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

untuk barang tidak diketahui keberadaannya ini dapat diketemukan pada Triwulan I Tahun 2019.

VI. Hasil Penelusuran Kelima :

Sisa barang yang tidak diketahui keberadaannya dan masih ditelusuri sebesar **Rp. 46.777.201,-** (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah). barang yang sudah diketemukan dalam keadaan rusak berat sebesar **Rp. 10.390.001,-** (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Satu Rupiah) sehingga sisa yang masih ditelusuri sebesar **Rp. 36.387.200,-** (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

VII. Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2019 pada hari jum'at tanggal 20 bulan Desember tahun 2019 telah dilakukan pemusnahan Barang Milik Daerah sebesar **Rp. 94.087.733,33,-** (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah koma Tiga Puluh Tiga Sen). Kondisi barang tersebut rusak berat. Pemusnahan Barang Milik Daerah dilaksanakan di km 14 tempat pembuangan akhir jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya. dasar pemusnahan surat keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/525/2019 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019 tanggal 13 November 2019.

VIII. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya telah memiliki gedung kantor Eks Gedung kantor



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dengan dasar surat keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/546/2019 tentang Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan dari Dinas Kesehatan kota Palangka Raya kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya tanggal 16 Desember 2019 dengan nilai buku bangunan gedung kantor permanen sebesar **Rp.385.557.182,00,-** (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan gedung garasi / pool semi permanen sebesar **Rp. 113.750.000,00,-** (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga dengan total nilai buku sebesar **Rp. 499.307.182,00,-** (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

#### IX. Penelusuran

Dari hasil penelusuran sisa barang yang tidak diketahui keberadaannya dan masih ditelusuri sebesar **Rp. 36.107.200,00,-** (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah). Barang yang sudah diketemukan dalam keadaan rusak berat sebesar **Rp. 24.884.200,-** (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), sehingga sisa barang yang tidak diketahui keberadaannya dan masih ditelusuri sebesar **Rp. 14.223.000,-** (Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

**BAB IV**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**IV.1. Penjelasan Pos Neraca**

**IV.1.1. Kas**

**IV.1.1.1. Kas di bendahara pengeluaran**

Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 0,00-**,

<b><u>Tahun 2021 (Rp)</u></b>	<b><u>Tahun 2020 (Rp)</u></b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah sebesar **Rp.2.552.175,00-**,

<b><u>Tahun 2021 (Rp)</u></b>	<b><u>Tahun 2020 (Rp)</u></b>
<b>2.552.175,00</b>	<b>1.652.175,00</b>

**IV.1.1.1.2 Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan barang-barang yang dimaksud untuk tidak dijual dan/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir (Berita Acara Hasil opname sebagaimana terlampir). Dan Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian **Rp. 194.744.150,-** merupakan persediaan barang ATK dengan rincian kertas HVS Folio F4 70 gram sebanyak 3 Rim dan Tinta Printer sebanyak 10 Botol dan Barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga

<b><u>Tahun 2021 (Rp)</u></b>	<b><u>Tahun 2020 (Rp)</u></b>
<b>194.744.150,00</b>	<b>2.060.000,00</b>

**IV.1.1.1.3 Aset Tetap**

Data Awal Aset tetap pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya merupakan hasil penilaian kembali Aset pada Tahun 2005. Nilai Aset Tetap periode 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 4.193.882.593,00,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	Rp.	0,00
Peralatan Mesin	Rp.	7.258,307.864,56
Gedung Bangunan	Rp.	599.192.950,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	28.111.000,00
Aset Tetap Lainnya	Rp.	0,00
Akumulasi Penyusutan	Rp.	(3.691.729.221,56)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.139.882.593,00</b>

<b><u>Tahun 2021 (Rp)</u></b>	<b><u>Tahun 2020 (Rp)</u></b>
<b>4.193.882.593,00</b>	<b>3.613.944.649,00</b>



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

**IV.1.1.1.4 ASET LAINNYA**

Aset Tidak Berwujud :

Nilai Awal	Rp. -
Beban Penyusutan	Rp. -
Aset Tidak Berwujud	Rp. 692.553.550,00
Aset Lain-Lain	Rp. 994.964.817,66
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp. (141.555.550,00)

**JUMLAH ASET LAINNYA Rp. 1.545.962.817,66**

<u><b>Tahun 2021 (Rp)</b></u>	<u><b>Tahun 2020 (Rp)</b></u>
<b>1.545.962.817,66</b>	<b>1.669.927.817,66</b>

<b>Penyusutan</b>	<b>Rp. -</b>
-------------------	--------------

**JUMLAH ASET Rp. 5.937.141.735,66**

<u><b>Tahun 2021 (Rp)</b></u>	<u><b>Tahun 2020 (Rp)</b></u>
<b>5.937.141.735,66</b>	<b>5.287.584.641,66</b>

**IV.1.a KEWAJIBAN Rp. 7.355.521,00**

Saldo Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 7.355.521,00**

<u><b>Tahun 2021 (Rp)</b></u>	<u><b>Tahun 2020 (Rp)</b></u>
<b>7.355.521,00</b>	<b>4.803.459,00</b>

**IV.1.b EKUITAS**

**EKUITAS Rp. 5.929.786.214,66**

<u><b>Tahun 2021 (Rp)</b></u>	<u><b>Tahun 2020 (Rp)</b></u>
<b>5.929.786.214,66</b>	<b>5.282.781.182,66</b>

**JUMLAH EKUITAS DANA**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

---

**TOTAL EKUITAS DANA**

**TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** **Rp. 5.937.141.735,66**

**IV. 2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

**IV.2.1 PENDAPATAN**

Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 0,00,-**

**IV.2.2 BELANJA**

**1. Belanja Operasi** **Rp.12.469.005.726,00**

<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
12.469.005.726,00	8.466.051.981,00

Belanja Pegawai Rp. 4.113.034.518,00

Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.355.971.208,00

Belanja Hibah Rp. 0,00

**2. Belanja Modal** **Rp. 1.745.682.896,00**

<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
1.745.682.896,00	1.640.915.100,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 1.745.682.896,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00

**IV.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional**

**IV.3.1 Pendapatan**

Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah sebesar **Rp. 0,00,-**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

#### IV.3.2 Beban

Jumlah Realisasi Beban Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah sebesar **Rp.13.445.141.117,41-**, dengan tabel rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
01	Beban Pegawai – LO	4.113.034.518,00	3.969.501.312,00	143.533.206,00	3,62
02	Beban Persediaan	437.774.000,00	463.448.310,00	(25.674.310,00)	(5,54)
03	Beban Jasa	6.517.569.343,00	3.538.653.647,33	2.978.915.695,67	84,18
04	Beban Pemeliharaan	435.374.350,00	79.287.000,00	356.087.350,00	449,11
05	Beban Perjalanan Dinas	807.080.427,00	413.205.590,00	393.874.837,00	95,32
06	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.120.919.070,41	901.647.752,22	219.271.318,19	24,32
14	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.983.859,00	11.983.859,00	0,00	0,00
15	Beban Penyusutan Jalan, Jarigan dan Irigasi	1.405.550,00	234.258,00	1.171.292,00	500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.445.141.117,41</b>	<b>9.377.961.728,55</b>	<b>4.067.179.388,86</b>	<b>43,37</b>

#### IV.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dengan tabel rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

No	Uraian	2021	2020
01	EKUITAS AWAL	5.282.781.182,66	4.554.765.830,21
02	SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.445.141.117,41)	(9.377.961.728,55)
03	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0	
	Koreksi Nilai Persediaan	0	0
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
	Koreksi ekuitas lainnya	(122.542.472,59)	(990.000,00)
04	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14.214.688.622,00	10.106.967.081,00
05	EKUITAS AKHIR	5.929.786.214,66	5.282.781.182,66



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

**BAB V**

**PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Per 31 Desember 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007
2. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PENGUNA ANGGARAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA**



**Dra. FIFI ARFINA, M.Si**  
**NIP.19640704 198303 2 001**